

BAB IV
EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD

IV.1. Konsistensi Kebijakan RPJMD Dalam RKPD

Keselarasan kebijakan RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015
dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
1.	Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan		
	Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai - nilai dasar Trisakti Bung Karno.	Misi 1 telah terjabar di dalam prioritas pada misi-misi yang lain.	Misi 1 telah terjabar di dalam prioritas pada misi-misi yang lain.
2.	Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus : 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, layanan pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi dan kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni); 2) Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha; 3) Pembangunan prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif; 4) Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan; 5) Peningkatan ketahanan pangan khususnya untuk peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan di masyarakat;	Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus: 1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola <i>quick win</i> ; 2) Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola bottom up di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah; 3) Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
	1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; 2) Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; 3) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan; 4) Mengembangkan regulasi ketahanan		

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria; 5) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 6) Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan; 7) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan; 8) Meningkatkan budaya hemat energi; 9) Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi; 10) Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; 11) Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; 12) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; 13) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan	6) Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan, khususnya untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif. Peningkatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus : 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan, konsumsi makan ikan; serta penguatan sistem penyuluhan; 2) Peningkatan kualitas, kapasitas dan pengelolaan sarana prasarana jaringan irigasi serta peningkatan ketersediaan air baku; 3) Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat; 4) Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; penguatan peran kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 5) Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi; 6) Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai.	4) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; 5) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK; 7) Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK; 8) Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga; 9) Peningkatan informasi sistem on line pencari kerja dan pasar kerja; 10) Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha; 11) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan; 12) Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja; 13) Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah; 14) Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; 15) Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda; 16) Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU)

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	standar mutu produk lokal;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus :	dengan pemangku kepentingan sekitar;
14)	Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;	1) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kompetensi/kualifikasi tenaga pendidik, optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa bagi keluarga kurang mampu serta pengembangan provinsi vokasi dan desa vokasi;	17) Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;
15)	Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;		18) Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat.
16)	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;		Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus:
17)	Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;	2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan;	1) Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah didukung rekayasa teknologi;
18)	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;		2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;
19)	Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;	3) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB serta fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk;	3) Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
20)	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;	4) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;	4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
21)	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;	5) Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberda-yaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);	5) Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;
22)	Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;	6) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan	6) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan
23)	Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan		

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	masyarakat; 24) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	pengembangan kewira-usahaan, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK; 7) Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan; 8) Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengem-bangan kualitas kesenian budaya daerah, permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian benda cagar budaya; 9) Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemu-daan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan keolahragaan; 10) Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.	pangan, didukung penguatan kelembagaan; 7) Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 8) Membangun jaringan antar petani dan pengolah/industri; 9) Implementasi kartu petani dan BBM nelayan; 10) Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif; 11) Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan; 12) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB; 13) Peningkatan rasio elektrifikasi melalui jaringan listrik perdesaan; 14) Peningkatan budaya hemat energi.
3.	Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	Tata kelola pemerintahan, dengan fokus : 1) Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2) Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan pemerintah daerah; 3) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus: 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan; 2) Peningkatan demokratisasi dan
	1) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan		

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	karier yang terbuka; 2) Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; 3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; 4) Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; 5) Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota; 6) Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; 7) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 8) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; 9) Mengoptimalkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; 10) Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah;	4) Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM; 5) Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD	pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat; 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	11) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.		
4.	Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	Demokratisasi dan kondusivitas daerah, dengan fokus : 1) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; 2) Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam mendukung kondusivitas daerah termasuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014; 3) Rencana Aksi Terpadu Gangguan Kamtramtibum sebagai upaya pencegahan konflik sosial.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus: 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan; 2) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat; 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.
	1) Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik; 2) Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; 3) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; 4) Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar; 5) Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik; 6) Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini; 7) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.		

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Demokratisasi dan kondusivitas daerah, dengan fokus : 1) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; 2) Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai, transplantasi karang dan terumbu buatan, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir; 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; 4) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan teresterial maupun pesisir dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan; 5) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; 6) Peningkatan upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemu-lihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi – rekonstruksi pasca bencana termasuk peningkatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus: 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan; 2) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat; 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur.
	1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug; 2) Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan; 3) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; 4) Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa; 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.		

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	Kualitas sumber daya manusia, dengan fokus: 1) Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2) Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan pemerintah daerah; 3) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM; 5) Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus: 1) Peningkatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah; 2) Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal; 3) Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif; 4) Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan; 5) Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal; 6) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; 8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveillance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana; 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan; 10) Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA; 11) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
	1) Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis; 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 3) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 4) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan; 6) Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; 7) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional); 8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku		

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	secara berkelanjutan; 9) Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan; 10) Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.		terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta trafficking; 12) Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang; 13) Perluasan program KB dalam kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan; 14) Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial; 15) Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDA; 16) Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti serta pelestarian cagar budaya; 17) Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan; 18) Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur dan pengembangan wilayah Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus :	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus:
	1) Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; 2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya); 3) Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik. 4) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta	1) Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta kinerja BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) Peningkatan penanganan jalan, jembatan dan peningkatan sarana dan prasarana keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal; 3) Peningkatan penanganan aksesibilitas Pantura-Pansela, perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah/ Lokal, kawasan pariwisata, wilayah terisolir, dan wilayah rawan bencana; 4) Dukungan penanganan dan penyelesaian infrastruktur strategis utamanya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Bawen-Solo, Solo-Mantingan dan Pantura), pengembangan Bandara A. Yani Semarang, pengembangan Bandara Dewadaru Jepara, pembangunan <i>double track</i>, reaktifasi jalur KA. Kedungjati-Tuntang, pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dengan Pelabuhan penyeberangan Kendal, serta pembangunan Waduk Jatibarang, Matenggeng, Kuningan, Pidekso, Gondang dan Logung; 5) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH dan PLTPB;	1) Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; 3) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; 4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 5) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum; 6) Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya; 7) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat; 8) Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; 5) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal; 6) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan; 7) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (<i>Public Private Partnership</i>), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) serta mengupayakan	6) Peningkatan Rasio Elektrifikasi melalui Jaringan Listrik Pedesaan.	Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus: 1) Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m; 2) Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; 3) Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekonstruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantura dengan koridor Pansela (Pemalang-Purbalingga-Kebumen; Wiradesa-Kalibening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo-Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta); 4) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan; 5) Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (diantaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
	dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa; 8) Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi; 9) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 10) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; 11) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; 12) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; 13) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup; 14) Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).		Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, <i>underpass</i> Jatingaleh Kota Semarang dan <i>fly over</i> Palur Sukoharjo serta JJLS); 6) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota; 7) Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku; 8) Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progopistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota; 9) Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya; 10) Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota Semarang secara komprehensif serta

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
			rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota; 11) Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi; 12) Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 13) Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penegendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; 14) Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapuran dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto; 15) Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ; 16) Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan; 17) Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP; 18) Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung

No	Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018	Prioritas RKPD 2014	Prioritas RKPD 2015
			Emas; jalur <i>underpass</i> /layang; 19) Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan pelabuhan karimunjawa - jepara; 20) Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara umum kebijakan dalam RPJMD telah selaras dengan RKPD tahun 2014 dan tahun 2015 utamanya apabila disandingkan antara kebijakan RPJMD dengan prioritas pembangunan dalam RKPD.

IV.2. Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD

Tabel 4.2
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
URUSAN WAJIB			
1. Pendidikan			
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.	Program Pendidikan Dasar	Program Pendidikan Dasar	Program Pendidikan Dasar
3.	Program Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah
4.	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal
5.	Program Pendidikan Khusus	Program Pendidikan Khusus	Program Pendidikan Khusus
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8.	Program Fasilitasi Sumber daya Pendidikan Tinggi	Program Fasilitasi Sumber daya Pendidikan Tinggi	Program Fasilitasi Sumber daya Pendidikan Tinggi
9.	Program Pendidikan Berkelanjutan	Program Pendidikan Berkelanjutan	Program Pendidikan Berkelanjutan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
2. Kesehatan			
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
11.	Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
12.	Program Pelayanan Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan
13.	Program Kesehatan Lingkungan	Program Kesehatan Lingkungan	Program Kesehatan Lingkungan
14.	Program Sumberdaya Manusia Kesehatan	Program Sumberdaya Manusia Kesehatan	Program Sumberdaya Manusia Kesehatan
15.	Program Promosi dan Kesehatan	Program Promosi dan Kesehatan	Program Promosi dan Kesehatan
16.	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
17.	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)
3. Pekerjaan Umum			
18.	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
19.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
20.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
21.	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, serta jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, serta jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, serta jaringan Pengairan Lainnya
22.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
23.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya
24.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
25.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan
26.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
27.	Program Pembengunaan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pembengunaan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pembengunaan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
4. Perumahan Rakyat			
28.	Program Pembangunan Perumahan	Program Pembangunan Perumahan	Program Pembangunan Perumahan
29.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
5. Penataan Ruang			
30.	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
31.	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan			
32.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
33.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
34.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
35.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
36.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
37.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
38.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
39.	Program Pembangunan IPTEK dan Inovasi Daerah	Program Pembangunan IPTEK dan Inovasi Daerah	Program Pembangunan IPTEK dan Inovasi Daerah
7. Perhubungan			
40.	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Program Pengembangan Perhubungan Darat
41.	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Program Pengembangan Perhubungan Laut
42.	Program Pengembangan Perhubungan Udara	Program Pengembangan Perhubungan Udara	Program Pengembangan Perhubungan Udara
43.	Program Pos, Telekomunikasi dan SAR	Program Pos, Telekomunikasi dan SAR	Program Pos, Telekomunikasi dan SAR
8. Lingkungan Hidup			
44.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
45.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
46.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
47.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
48.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
49.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
9.Pertanahan			
50.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
10.Kependudukan dan Catatan Sipil			
51.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
52.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
53.	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
54.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
55.	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
56.	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Keluarga Berencana
57.	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
58.	Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD
59.	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri
60.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita
13. Sosial			
61.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
62.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
63.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
64.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
65.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
14. Ketenagakerjaan			
66.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
67.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
68.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
69.	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
70.	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal
71.	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan
72.	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
73.	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
16. Penanaman Modal			
74.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
75.	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
76.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
17. Kebudayaan			
77.	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
78.	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
79.	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
18. Kepemudaan dan Olah Raga			
80.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga
81.	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
82.	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
83.	Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
84.	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga
85.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
86.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
87.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
88.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
89.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
90.	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
91.	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)
92.	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian			
93.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
94.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
95.	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
96.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
97.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
98.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
99.	Program Pengelolaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Aset Daerah
100.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
101.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

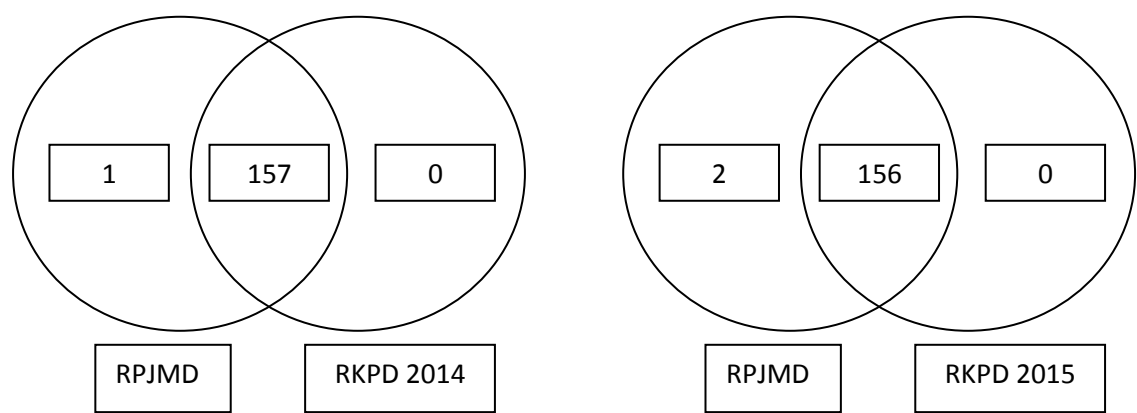
No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
102.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
103.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
21. Ketahanan Pangan			
104.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
105.	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
106.	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
107.	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
108.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
109.	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
23. Statistik			
110.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
24. Kearsipan			
111.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
112.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
113.	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat
114.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
25. Komunikasi dan Informatika			
115.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
116.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
117.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
118.	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
26. Perpustakaan			
119.	Program Pengembangan Budaya Baca	Program Pengembangan Budaya Baca	Program Pengembangan Budaya Baca
120.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
121.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan
122.	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan
URUSAN PILIHAN			
1. Pertanian			
123.	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis
124.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-
125.	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	-	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
2. Kehutanan			
126.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
127.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
128.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
129.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
130.	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
3. Energi Sumber Daya Mineral			
131.	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
132.	Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas	Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas	Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
133.	Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
134.	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
135.	Program Peningkatan SDM bidang ESDM	Program Peningkatan SDM bidang ESDM	-
4. Pariwisata			
136.	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
137.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
138.	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan
5. Kelautan dan Perikanan			
139.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
140.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
141.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap

No	Program dalam RPJMD	Program dalam RKPD 2014	Program dalam RKPD 2015
142.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
143.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
144.	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan			
145.	Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
146.	Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM	Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM	Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM
147.	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
7. Perindustrian			
148.	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT)	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT)	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT)
149.	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH)	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH)	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH)
150.	Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA)	Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA)	Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA)
151.	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang
8. Transmigrasi			
152.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
153.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
154.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
155.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
156.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
157.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
158.	Program Jasa Pelayanan Kesehatan	Program Jasa Pelayanan Kesehatan	Program Jasa Pelayanan Kesehatan

Secara umum pelaksanaan program dalam RKPD 2014 dan 2015 telah selaras dengan program yang terdapat dalam RPJMD. Program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sebanyak 158 program dan dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2014 sejumlah 157 program (99,36%) dikarenakan Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan mulai tahun 2015. Kemudian dalam RKPD tahun 2015 berkurang 2 program yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani karena diintegrasikan ke dalam Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian. Selanjutnya untuk Program Peningkatan SDM bidang ESDM diintegrasikan ke dalam Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah. Dengan demikian jumlah Program dalam RKPD Tahun 2015 sebanyak 156 program (98,73%) yang dapat dilihat pada gambar 4.1.

Lebih lanjut dapat dikemukakan dari 158 program yang tertuang dalam RPJMD terdiri atas 122 program Urusan Wajib dan 30 program Urusan Pilihan serta 6 program Pendukung Operasional SKPD.



Gambar 4.1.
Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015
Dengan Program RPJMD Tahun 2013-2018